

# RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**



**DINAS PERIKANAN  
KABUPAATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2023**



**DINAS PERIKANAN  
KABUPAATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021-2026 yang memuat rencana program kegiatan dan target capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan perikanan dalam tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan dan arah kebijakan pembangunan perikanan agar tujuan dan sasaran program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Atas kerjasama semua pihak Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 dapat tersusun dengan harapan mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatannya nanti di tahun 2023 dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Arga Makmur, 2022  
Kepala Dinas,  
  
SUGIMIN, S.Pd, M.Pd  
Nip. 19661103 198612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	35
2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD .....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	50
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan .....	60
3.3 Program dan Kegiatan .....	62
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	70
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	79

## DAFTAR TABEL

II.1	Tabel SILPA Anggaran Tahun 2021.....	11
II.2	Tabel Realisasi Keuangan DAK Tahun 2021.....	16
II.3	Tabel Penerima DAK Tahun 2021.....	17
II.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	20
II.5	Tabel IKU Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan .....	28
II.6	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.....	29
II.7	Indikator Kinerja Pada Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.....	30
II.8	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pendukung Sasaran ke-2.....	33
II.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.....	34
II.10	Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2023.....	39
II.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	51
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	66
IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Hubungan RENJA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Dokumen Anggaran .....	4
-----	--	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah pada Tahun 2021 serta permasalahan dan tantangan prioritas yang diestimasi akan terjadi pada Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini kemudian akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan, yang secara substansi memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/subfungsi pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 sebagai dokumen rencana kerja rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan



program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 secara operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, antara lain :

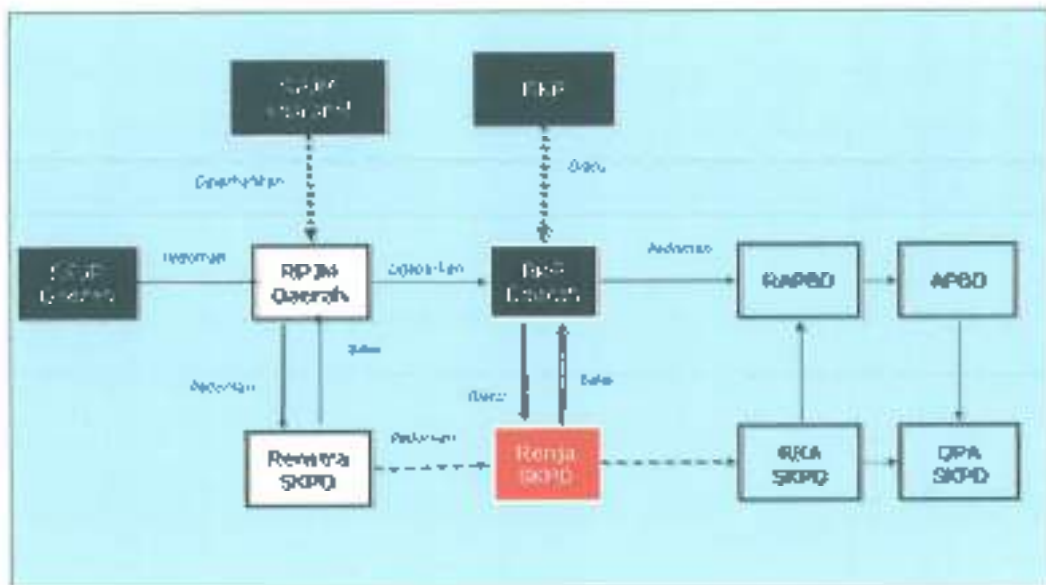
1. Disusun berdasarkan evaluasi tahun berkenaan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dan Nasional pada umumnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada

Gambar. 1.1 berikut :



Gambar. 1.1. Bentuk Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Dokumen Anggaran.

Mengacu pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD
- RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2022, RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Rencana Kerja RPJM

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 18).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Perikanan di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai akselerasi pencapaian visi Bengkulu Utara 2021-2026.
- b. Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi perencanaan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan tahun 2023.
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- f. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

- g. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 ini disusun menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran belanja langsung Dinas Perikanan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.060.573.833,- (Dua Milyar Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan belanja tidak langsung /gaji sebesar Rp. 3.002.352.472,- ( Tiga Milyar Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dengan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 5.062.926.305,- (Lima Milyar Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Tiga Ratus Lima Rupiah) dan Jumlah penerima DAK sejumlah Rp 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Dengan pertanggungjawaban realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Dari total anggaran APBD Dinas Perikanan sebesar Rp. 5.062.926.305,- (Lima Milyar Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) kemudian dapat direalisasikan secara keseluruhan fisiknya 100% dan keuangannya 90,06 % sebesar Rp. 4.559.660.492,- ( Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan sisa lebih anggaran (SILPA) Rp. 503.265.813,- (Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), dengan rincian SILPA sebagai berikut :
  - a. Dari kegiatan administrasi keuangan daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu sebesar Rp. 477.699.561,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada eselon 3 dan 4 serta adanya pegawai yang pensiun.

b. Kegiatan rutinitas kantor sebesar Rp. 25.566.252,- ( Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel dibawah ini :

*Tabel. 11.1. Tabel SILPA Anggaran Tahun 2021*

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Silpa	Sumber Dana
<b>3.25.01.2.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</b>	<b>1,707,839</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,023	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,237	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	97,674	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,104	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,442,801	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	159,000	APBD
<b>3.25.01.2.01.02</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>35,019</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	227	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	32,200	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,052	APBD
<b>3.25.01.2.01.01.04</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>	<b>32,491</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover	227	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	32,200	APBD
<b>3.25.01.2.01.01.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD</b>	<b>27,600</b>	<b>APBD</b>

	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27,600	APBD
<b>3.25.01.2.01.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>489,030</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	895	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	809	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26,874	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226,452	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150,000	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84,000	APBD
<b>3.25.01.2.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>477,699,561</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	297,424,435	APBD
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42,660,890	APBD
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	31,553,140	APBD
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15,212,541	APBD
	Belanja Tunjangan Beras PNS	27,332,145	APBD
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS PNS	2,355,222	APBD
	Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji PNS	7,063	APBD
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,293,781	APBD
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3,881,244	APBD
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	55,979,100	APBD
<b>3.25.01.2.02.02</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>1,206,561</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1,200,000	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,092	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	409	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,060	APBD
<b>3.25.01.2.03.06</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>500,000</b>	<b>APBD</b>

	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	500,000	APBD
<b>3.25.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>2,106,348</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	400,000	APBD
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,057	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	487	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor	821	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	531	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,977	APBD
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	151,499	APBD
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4,455	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,533,503	APBD
<b>3.25.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</b>	<b>203,941</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	203,941	APBD
<b>3.25.01.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>10,908</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,908	APBD
<b>3.25.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>2,652,964</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,095,964	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	557,000	APBD
<b>3.25.01.2.06.05</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>1,900</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Modal Personal Komputer	1,900	APBD
<b>3.25.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</b>	<b>1,455,324</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Tagihan Air	766,023	APBD
	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	689,301	APBD

3.25.01.2.06.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800,000	APBD
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	800,000	APBD
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	1,242,502	APBD
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	922,730	APBD
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,272	APBD
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	312,500	APBD
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,857,500	APBD
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,247,100	APBD
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,410,400	APBD
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200,000	APBD
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,340	APBD
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	596	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	195	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,549	APBD
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1,762,000	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,000	APBD
	Belanja Hibah Barang Kepada Koperasi	1,745,000	APBD
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	397,459	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2,459	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	92,000	APBD

	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	303,000	APBD
<b>3.25.03.2.04.02</b>	<b>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,545,000</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bibit Ternak/Bibit Ikan	387,200	APBD
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	232,200	APBD
	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5,925,600	APBD
<b>3.25.03.2.01.05</b>	<b>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</b>	<b>8,364</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,364	APBD
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>519,162</b>	<b>APBD</b>
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,169	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,128	APBD
	Belanja Alat/Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,945	APBD
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,920	APBD
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	500,000	APBD
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,000	APBD
		<b>503,265,813</b>	

2. Khusus untuk anggaran DAK Dinas Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan realisasi keuangannya yaitu 99,36% sebesar Rp 1.251.693.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan saldo

Rp. 8.307.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi fisiknya sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel dibawah ini :

Tabel. 11.2. Tabel Realisasi Keuangan DAK Tahun 2021

Urutan Kegiatan DAK	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisi (Rp)
a. Pembangunan/rehabilitas Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul</li> <li>• Budidaya Pakan Alami</li> </ul>	145.000.000	144.380.600	619.400
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perahu/Kapal Penangkap Ikan Untuk Peralatan Laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin, Alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan</li> <li>• Alat penangkapan ikan ramah lingkungan</li> </ul>	400.000.000	398.255.000	1.745.000
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)</li> </ul>	660.000.000	654.074.400	5.925.600
d. Kegiatan Penunjang, terdiri dri : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan pengendalian dan pengawasan penugasan</li> </ul>	55.000.000	54.985.000	17.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>1.251.693.000</b>	<b>8.307.000</b>

Adapun Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) ataupun koperasi nelayan

penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. H.3. Tabel penerima DAK Tahun 2021

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Paket	Penerima/Kecamatan/Lokasi
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul di lokasi	2 paket.	1 BBI Kecamatan Argamakmur
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Budidaya Pakan Alami	1 paket.	1 BBI di Kecamatan Arga Makmur
3	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Perahu/kapal penangkap ikan untuk peralatan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan	2 paket.	Koperasi Nina Segar / Kecamatan Air Napal
4	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring 15 set)	1 Paket	KUB Kahyapu/ Kecamatan Enggano
	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring 15 set)	2 Paket	KUB Muara Palik 01 dan KUB Tanjung Dalam/ Kecamatan Air Napal
5	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan	1 Paket	KUB Karang Tiga/ Kecamatan Enggano



	lingkungan (jaring 15 set)		Kecamatan Batik Nau
6	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan (jaring 15 set)	1 Paket	Koperasi Tunas Bahari Sebelau/ Kecamatan Putri Hijau
7	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	1 paket.	Pokdakan debur Onibak/Kecamatan Kerkep
8	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	1 paket.	Pokdakan Makmur /Kecamatan Air Besi
9	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)	1 paket,	Pokdakan Adol / Kecamatan Hulu Palik
10	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana	3 paket,	Pokdakan Mina Makmur, Pokdakan Fish Mina Politan dan Pokdakan Air Bambu /

	dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin)		Kecamatan Arga Makmur
11	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Arma Jaya 1 Pokdakan dengan 1 paket,	1 paket,	Pokdakan Nila Jaya/ Kecamatan Arma Jaya 1
12	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin).	2 paket,	Pokdakan Mina Tanjung/ Kecamatan Giri Mulya
13	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin).	1 paket,	Pokdakan Mina Harapan Tunggal/ Kecamatan Padang Jaya satu Pokdakan
14	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana	1 Paket	Pokdakan Maju Lancar/Ketahun satu Pokdakan

	dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin).		
15	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin).	1 paket.	Pokdakan Lestari Air/Kecamatan Pinang raya satu Pokdakan

#### **Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021**

Secara umum kegiatan pembangunan perikanan tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel. II.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021*

TABEL 3.4. RENCANA TULANG EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA SKPD DAN  
PENCAPAIAN KENSTRAS SKPD s/d TAHUN 2022  
PROVINSI GORONTALO KABUPATEN BENGKULU UTARA

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN				Indikator Kinerja Program (komponen)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (MPO Tahun 2022)	Alokasi Target Kinerja/Target Program dan Penerimaan Anggaran s/d Tahun 2022 (Tahun n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program s/d Kegiatan Tahun 2022 (Tahun n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja SKPD s/d Tahun 2022	
KODE	Uraian/Widang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Rincin SKPD Tahun 2022 (Tahun n-1)	Alokasi Renc SKPD Tahun 2022 (Tahun n-1)				Target Realisasi (n) Tahun 2022	Target Program / Kegiatan 2022 (Kerangka Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Capaian Program s/d Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Target Capaian s/d Target Daerah (n)	
											6
3	25	02		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	
3	25	08	2.01	Perubahan baik, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
3	25	02	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	
3	25	02	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	2	
3	25	02	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	2	2	2	2	2	

1	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2		1	1	2	1	2	2
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2		1	1	2	1	2	2
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3		2	2	1	4	1	3
3	25	03	7.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2		0	2	2	2	2	2
4	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pemahaman administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100		100	100	100	100	100	100
3	25	01	2.00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menempai Saji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	32		100	100	29	100/12	31	32
3	25	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	2		0	85	2	85	2	2
4	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Pencatatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12		90	90	12	95	12	12
3	25	03	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2		3	3	2	3	2	2

3	25	01	2.03	Agilalisasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan implementasi BMD Perangkat Daerah (%)	100	90	90	100	100	100	100	
3	25	01	2.03	06	Pencatustaan Barang Milik Daerah Pada S&PD	Jumlah Laporan Pencatustaan Barang Milik Daerah pada S&PD (laporan)	2	2	2	2	2	2	
3	25	01	2.05	Agilalisasi Kapasitas Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Realisasi Perangkat Daerah (persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
3	25	01	3.06	02	Pengadaan pakas dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakas Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	45	45	45	45	45	45	
3	25	01	3.06	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	1	1	1	1	1	
3	25	01	3.08	Agilalisasi Usahw Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan implementasi ushwa (%)	100	85	85	90	85	95	95	
3	25	01	7.06	03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	7	65	65	4	85	6	6
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	23	85	65	23	86	23	23
3	25	01	3.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (paket)	5	100	100	5	100	5	5
3	25	01	3.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	2	2.100	2.100	2	2.100	2	2
3	25	01	7.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	35	25	25	35	2100	35	35
3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Unitas Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD (unit)	11	11	11	11	2100	11	11	
3	25	01	7.07	03	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	12	1	1	2100	1	1
3	25	01	3.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	5	5	5	5	5	5	5

3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5		5		6	5	5	5	5
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Perumahan Urusan Pemukiman Desa	Persentase pemenuhan jasa perumahan (%)	100		100		100	100	100	100	100
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12		100		100	12	100	12	12
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12		100		100	12	100	12	12
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemukiman Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD (%)	100		100		100	100	100	100	100
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jatahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	2		100		100	2	100	2	2
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Politan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Politannya (unit)	21		100		100	21	100	21	21
3	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	20		100		100	17	100	19	20
3	25	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi (unit)	6		100		100	6	100	6	6

3	25	03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase proporsi peningkatan perikanan tangkap (%)	2,3		1,5		1,3	1,7	1,5	2,1	2,1	
3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dilakukan dalam 4 (empat) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dilaksanakan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum (kelompok)	10		7		7	10	7	10	10	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)	1		1		1	1	1	1	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	2		5		1	2	2	2	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit)	7		1		5	5	5	6	7
3	25	03	2.02		Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nelayan yang handal (%)	100		72,50		72,99	84,12	72,99	94,97	100
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	300		100		200	210	200	250	250
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	80		80		79	82	80	86	86
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase kepuasan nelayan terhadap pelayanan tempat pelelangan ikan (%)	85		85		85	85	85	85	85
1	25	03	2.03	02	Tubrukan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (layanan)	7		9		9	7	9	7	7
3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	1,9		1,1		1,3	1,2	1,1	1,7	1,9	



2	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (PORDUKSI) yang diberdayakan (kelompok)	21		13	13	16	13	16	13	21
3	25	04	2.02	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	25		130	190	30	130	30	30	30
3	25	04	2.02	04	Pelibatan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Mengikuti Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	35		15	15	20	15	30	30	30
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan yang aktif (kelompok)	154		148	148	149	148	152	152	152
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	7		1	1	4	1	6	6	6
3	25	04	2.04	03	Perbaikan ketersediaan sarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	13		12	12	7	12	11	11	11
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjadi Kejadian Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	1		Beruh Ikan : 200.000 ; Calon Induk : 800	Beruh Ikan : 200.000 ; Calon Induk : 800	1	Beruh Ikan : 400.000 ; Calon Induk : 800	1	1	1
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, pengembangan, pemantauan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	1		1	1	1	1	1	1	1
3	25	04			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertumbuhan Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	4		2	3,5	2,5	2	3,5	3,5	3,5

3	25	06	2.01	01	Penelitian Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi yang dibutuhkan untuk tanda daftar usaha hasil Perikanan (rekomendasi)	5		3	3	3	3	1	5	5
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)	1		1	1	1	1	1	1	1
3	25	06	2.02		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah rekomendasi yang dibutuhkan untuk supervisi bagi Pengasas/Industri Pemah Tangga (rekomendasi)	5		1	3	5	3	5	5	5
1	25	06	2.03	01	Pelaksanaan pembinaan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha)	13		30	25	7	30	11	11	11
3	25	06	2.02		Penyediaan dan Penyusunan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan bahan baku ikan segar (laut dan tawar) yang tersedia (%)	11		1,5	1,5	1	1,5	1	1	1
1	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	444,54		33,40	33,35	266,19	31,40	387,63	387,63	387,63
3	25	06	2.03	02	Pembinaan kualitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	33		6	2	15	6	20	10	10

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

**MISI 4 RPJMD : Membangun Ekonomi Kerakyatan**

**SASARAN 1 SKPD : Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan perikanan**

Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama akan diuraikan pada tabel berikut :

*Tabel 11.5 Tabel IKU Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan*

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2021	REALISASI		CAPAIAN 2021
			TA. 2020	TA. 2021	
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	1,26%	1.135 %	1,55 %	100 %

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perikanan di tahun 2021 adalah munculnya wabah covid -19 dan diikuti oleh refocusing kegiatan sehingga berkurangnya anggaran APBD murni SKPD. Namun di pertengahan dan akhir tahun pelaksanaannya, Dinas Perikanan Bengkulu Utara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bidang kelautan dan perikanan sejumlah Rp. 1.260.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : II.6 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021

No	Nama Urusan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul di lokasi BBI Kecamatan Argamakmur dengan 2 paket.	100.000.000,-	99.612.800,-
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Budidaya Pokon Air di lokasi BBI di Kecamatan Arga Makmur dengan 1 paket.	45.000.000,-	44.767.800,-
3	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Perahu/kapal penangkap ikan untuk peralatan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan di lokasi Kecamatan Air Napal satu koperasi dengan 2 paket.	300.000.000,-	298.540.000,-
4	Alat penangkapan ikan rumah lingkungan ( Kecamatan Eggano dengan 1 kelompok usaha bersama Kecamatan Putri Hijau dengan 1 Koperasi dengan nilai Rp. 20.000.000,-	20.000.000,-	19.943.000,-
5	Alat penangkapan ikan rumah lingkungan Kecamatan Air Napal dengan 2 kelompok usaha bersama.	40.000.000,-	39.886.000,-
6	Alat penangkapan ikan rumah lingkungan di Kecamatan Batik Mau dengan 1 kelompok usaha bersama	20.000.000,-	19.943.000,-
7	Alat penangkapan ikan rumah lingkungan Kecamatan Putri Hijau dengan 1 Koperasi dengan nilai	20.000.000,-	19.943.000,-
8	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Kerkap 1 Pokdakan dengan satu paket.	55.000.000,-	54.661.250,-
9	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Air Besi. 1 Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000	54.661.250
10	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Hulu Palik satu Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.196.100,-
11	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Arga Makmur 1 Pokdakan dengan 3 paket.	165.000.000,-	163.518.600,-
12	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Arma Jaya 1 Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.661.250,-
13	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Giri Mulya satu Pokdakan dengan 2 paket.	55.000.000,-	54.661.250,-
14	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Padang Jaya satu Pokdakan dengan 1 paket.	109.322.500,-	109.322.500,-
15	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lela, Patin) Kecamatan Ketahun satu Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.196.100,-

16	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha perbudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Pluin) Kecamatan Pinang raya satu Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.196.100,-
17	Kegiatan Penunjang perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan penugasan	55.000.000,-	54.983.000,-

Sumber : Realisasi DAK Bulan Desember Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun

2021

**MISI 4 RPJMD : Membangun Ekonomi Kerakyatan**

**SASARAN 2 SKPD : Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi**

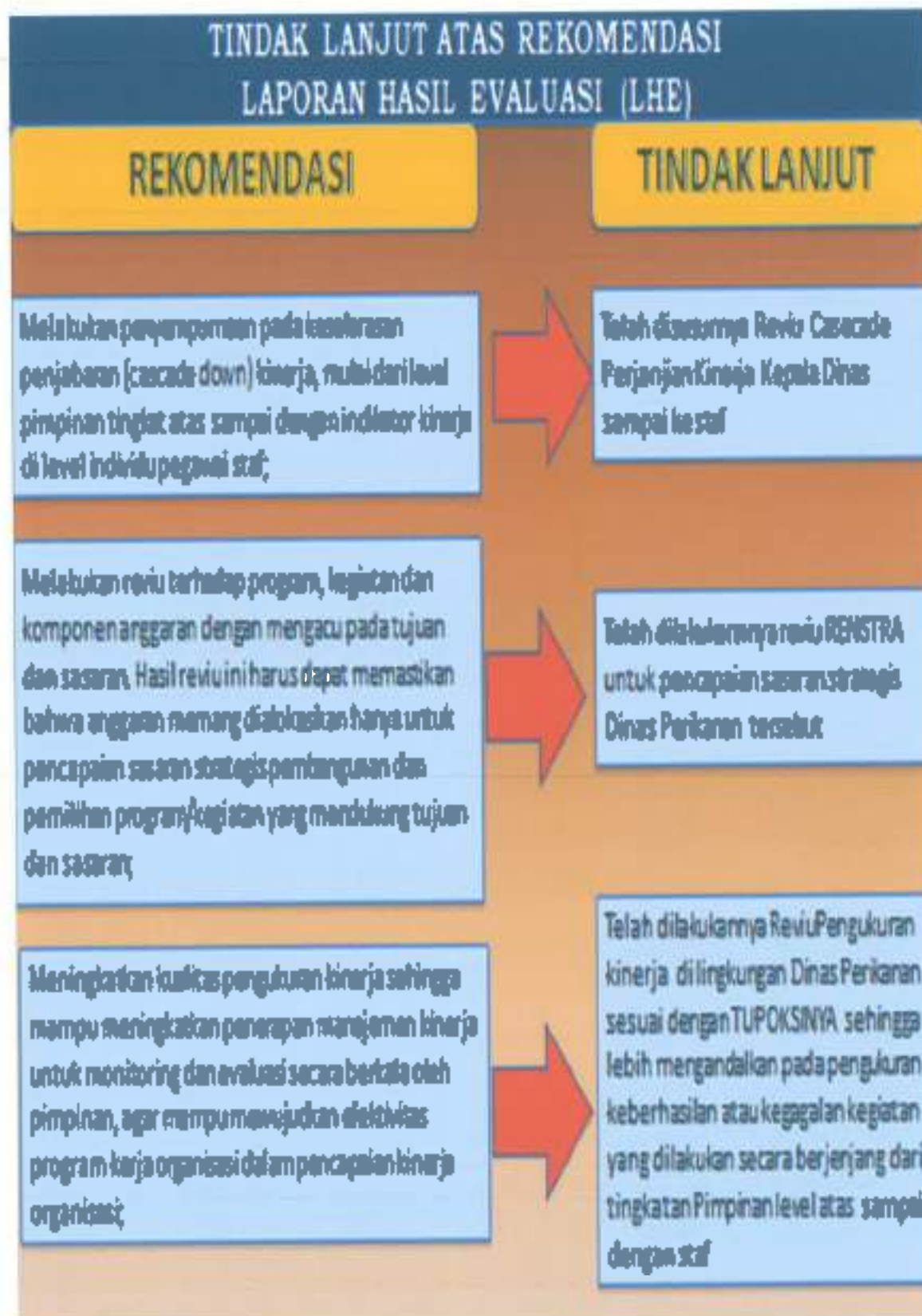
Dalam sasaran ini terdapat satu 1 satu indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran kedua akan diuraikan pada tabel berikut ini:

*Tabel 11.7 Indikator Kinerja Pada Sasaran -2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi*

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2021	REALISASI		CAPAIAN 2021
			TA. 2020	TA. 2021	
Nilai/predikat AKIP SKPD	100%	BB	B	BB	100%

Realisasi yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 dikarenakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara tidak melaksanakan revidi terhadap dokumen SAKIP OPD Tahun 2021 anggaran terkait pandemi covid-19, namun demikian Dinas Perikanan Bengkulu Utara tetap optimis mendapatkan nilai BB dengan range nilai berkisar diantara 70 – 80.

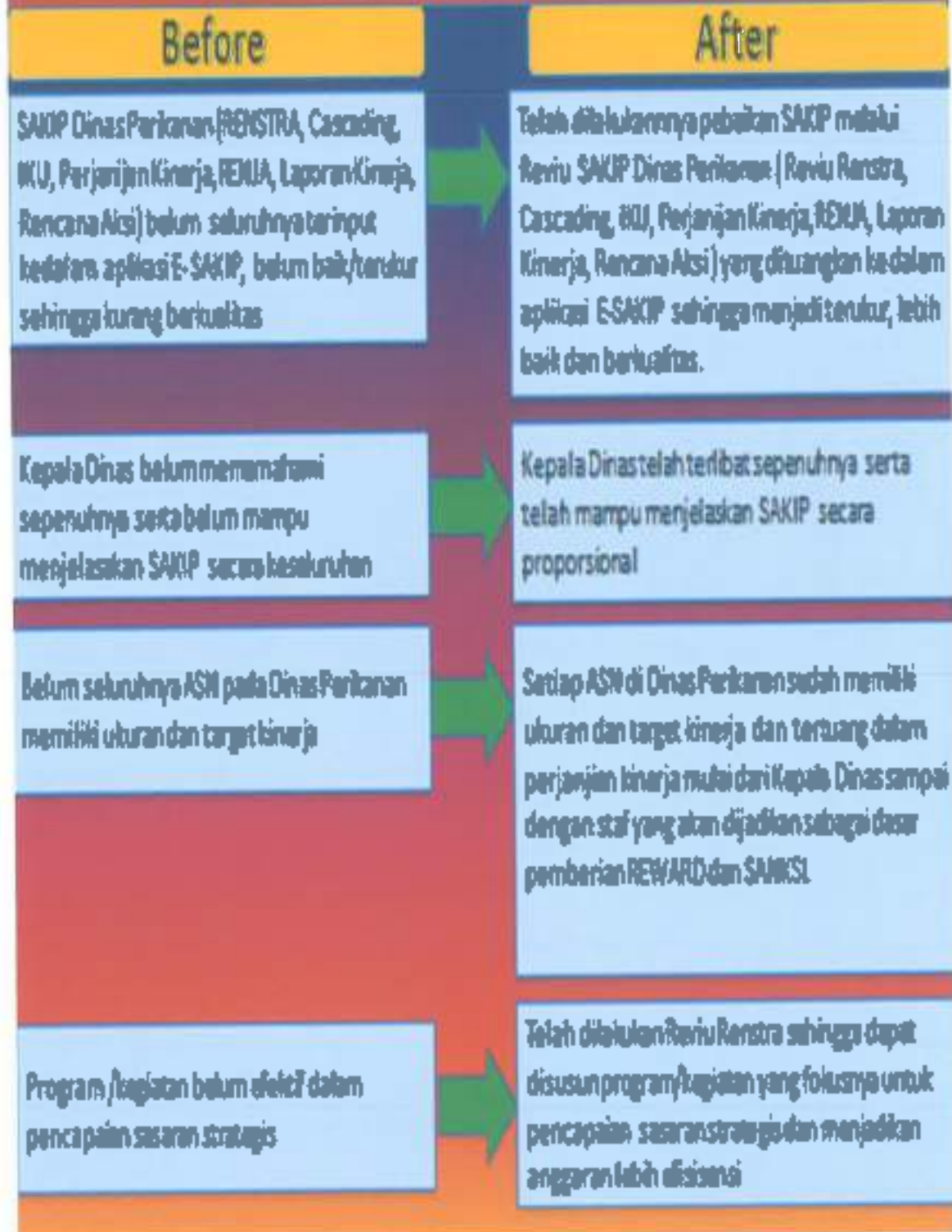
Adapun kiat-kiat Dinas Perikanan dalam usaha meningkatkan nilai predikat AKIP SKPD di Tahun 2023 adalah Dinas Perikanan melakukan review SAKIP dan terus berkoordinasi melalui ORTALA serta melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh KEMENPAN RB sebagai berikut :



Sedangkan untuk progres perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tahun

2022 adalah sebagai berikut :

**PROGRES PERBAIKAN DAN EVALUASI AKIP DINAS PERIKANAN  
KAB. BENGKULU UTARA**



Adapun Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran ke -2.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

*Tabel II.8 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan pendukung sasaran ke 2*

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU(Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.689.800,-	25.689.800,-

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan*



Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan  
Kabupaten Bengkulu Utara

No	Indikator	SPM	MKK	Tugas Rencstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Aspek
				Tahun 2021 Tha n-1	Tahun 2022 Tha n-1	Tahun 2023 Tha n	Tahun 2024 Tha n+1	Tahun 2023 Tha n-1	Tahun 2024 Tha n	Tahun 2023 Tha n	Tahun 2024 Tha n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fokus Layanan Unsur Pilihan											
	Bidang Kelautan dan Perikanan											
2.2.5	Kelautan dan Perikanan											
2.2.5.1	Produksi perikanan											
	Tangkap (ton)			6.129	6.220,58	6.326,33	6.446,53	6.129,21	6.129,21	6.326,93	6.446,53	
	Budidaya (ton)			14.673,23	15.036,87	15.217,31	15.430,35	14.868,10	14.868,10	15.217,31	15.430,35	
2.2.5.4	Keuntungan Ikan (Kgr orang Per Tahun)			33,45	33,40	33,45	33,50	40,66	40,66	33,45	33,50	
2.2.5.4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)			35,00	57,75	67,23	77,91	90,73	90,73	67,28	77,91	

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan perangkat pemerintah daerah, tentu mempunyai perencanaan strategi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan keberadaan sebagai unsur daerah tentu akan memberikan rincian atas program kegiatan yang bertanggung jawab dan dapat terukur baik kemajuan maupun kelemahannya. sehingga akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

### a. Pernyataan Visi Kepala Daerah

Dengan mengacu pada keberadaan sebagai unsur daerah yang mengemban tugas dengan berbagai upaya untuk percepatan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara mendukung visi Kepala dan wakil Daerah yaitu : *Terwujudnya masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Berkualitas*

### b. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka harus didukung dengan misi, adapun misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan bidang perikanan adalah terdapat pada misi 3 (tiga) yaitu:

#### *Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan*

Dalam rangka pelaksanaan mendukung misi tiga Kepala Daerah adalah dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi di Dinas Perikanan sebagai berikut :

- a. Mengajak dan membina masyarakat perikanan untuk sama-sama memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan agar lebih dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan usahanya serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- b. Peningkatan penerapan IPTEK dalam mengelola sumberdaya Perikanan. Usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan di Bengkulu Utara merupakan usaha yang turun

temurun. Adakalanya mereka masih menggunakan tradisi lama, untuk mencapai hasil yang maksimal tentu harus ada inovasi teknologi melalui Kaji Terap Teknologi sehingga didapat paket teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan baik teknologi budidaya, teknologi penangkapan dan teknologi pasca panen. Diharapkan penerapan IPTEK ini dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi perikanan.

- c. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan karena dalam tubuh ikan terdapat banyak mengandung protein dan terdapat zat omega 3 dan unsur lainnya. Omega 3 dapat merangsang kinerja otak sehingga masyarakat lebih cerdas dan sehat. Target konsumsi ikan kabupaten adalah 37,48 kg/kapita/tahun.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya perikanan dalam pembangunan perikanan tentunya perlu dipersiapkan sarana dan prasarana baik untuk perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan seperti : TPI, Pabrik Es, *Cold Storage*, SPDN, Pasar Ikan Tradisional dan lain-lain maupun untuk perikanan budidaya seperti Balai Benih Ikan (BBI) serta sarana penunjang lainnya. Semua ini antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan dengan sebaik-baiknya.
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lahan dan perairan termasuk penggunaan alat dan bahan penangkapan serta bahan pengolahan hasil perikanan. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tentu akan menyebabkan kemunduran sumberdaya hayati perairan yang selanjutnya perairan akan menjadi kritis, gersang dan rusak. Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan bahan dan alat terlarang seperti : racun, tuba, bom, potas, setrum/listrik dan alat tangkap terlarang lainnya serta penggunaan bahan yang berbahaya untuk kesehatan dalam pengolahan hasil perikanan.

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan pada nelayan kecil maupun pada pembudidaya ikan air tawar mengalami beberapa permasalahan dan hambatan yaitu :

1. Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi/hasil tangkapan ikan disebabkan oleh :
  - Kondisi cuaca yang tidak menentu (sering badai) menyebabkan jumlah melaut lebih sedikit.
  - Sebagian besar armada penangkapan yang dipakai berukuran kecil yang beroperasi *one day fishing* dengan jangkauan *fishing ground* lebih dekat dan jumlah alat tangkap yang terbatas serta kurang bervariasi.
  - Belum beroperasinya TPI secara optimal serta keterbatasan permodalan kurang mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan.
  - Kurangnya investor dibidang usaha penangkapan ikan yang menanamkan modal.
  - Kualitas SDM masih rendah.
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
  - Wabah Covid -19
2. Pada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi ikan air tawar disebabkan oleh :
  - Masih rendahnya IPTEK pembudidaya ikan
  - Belum optimalnya sarana pembenihan, baik BBI maupun UPR sehingga belum didaparkannya benih yang bermutu, dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan.
  - Keterbatasan operasional untuk BBI dan petugas penyuluh perikanan budidaya.

- Biaya produksi untuk kegiatan budidaya cukup besar (harga pakan ikan/pellet relatif mahal) sedangkan permodalan yang dimiliki terbatas.
- Lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- Wabah Covid -19

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran maka lebih dahulu diturunkan faktor- faktor kunci keberhasilan yang berpengaruh dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan melihat *Strength, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Selanjutnya analisis diarahkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya manusia perikanan yang memadai (kualitas dan kuantitas).
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan.
- c. Adanya uraian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang memadai.
- d. Adanya komitmen yang kuat baik pemerintah maupun masyarakat perikanan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan daerah.
- e. Adanya perangkat atau produk hukum yang jelas dan tegas baik untuk pengelola maupun terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan (SDKP) dan bahan pengolahan hasil perikanan yang berbahaya bagi kesehatan.

Dalam penentuan isu-isu penting/strategis, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merumuskan beberapa catatan untuk diindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan , antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Mahalnya harga pelet dan obat-obatan untuk budidaya ikan
3. Degradasi lingkungan pesisir laut dan garis pantai serta penurunan stok ikan.
4. Keterbatasan modal usaha baik usaha dibidang penangkapan ikan maupun budidaya ikan air tawar.
5. Minimnya investor yang menanamkan modalnya dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Rendahnya kualitas SDM Perikanan dan penerapan IPTEK dalam aktivitas perikanan.
7. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bidang perikanan.
8. Keterbatasan sarana dan operasional dalam memproduksi benih ikan unggul.

#### **2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD**

Review terhadap rencana kerja RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perikanan, terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rencana renja RKPD terdapat pada tabel berikut ini:

*Tabel : II.10 Review terhadap Rencana Kerja (Renja)) RKPD Tahun 2023 Kabupaten Bengkulu Utara*

**TABEL EL10**  
**REVIEW TERKADAP RENCANA AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**KABUPATEN BANGGULAY UTARA**

Ramah SIPD - Data Partisipasi Masyarakat Terhadap Ombudsman

Rencana Awal SIPD					Realisasi Pelaksanaan					Catatan
Program/Kelemb	Uraian	Indikator Kinerja	Target Output	Page Indikasi	Program/Kelemb	Uraian	Indikator Kinerja	Target Output	Page Indikasi	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STRUKTUR PEMERINTAHAN				4.040.000.000	STRUKTUR PEMERINTAHAN				4.040.000.000	
STRUKTUR PEMERINTAHAN AWAL BERSAMA KOMUNITAS DAN PERUSAHAAN				4.040.000.000	STRUKTUR PEMERINTAHAN AWAL BERSAMA KOMUNITAS DAN PERUSAHAAN				4.040.000.000	
Program Penjangkauan Pemertahanan Daerah Kabupaten/Batas	Kebijakan Strategis Utama	Pertemuan rutin antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	2.046.140.000	Program Penjangkauan Pemertahanan Daerah Kabupaten/Batas	Kebijakan Strategis Utama	Pertemuan rutin pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	2.046.140.000	
Pertemuan Rutin, Pengabdian, dan Bantuan Lainnya Terhadap Masyarakat	Kebijakan Strategis Utama	Kegiatan pertemuan rutin antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	98.040.000	Pertemuan Rutin, Pengabdian, dan Bantuan Lainnya Terhadap Masyarakat	Kebijakan Strategis Utama	Kegiatan pertemuan rutin antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	98.040.000	
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dibuat)	1	26.710.000	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dibuat)	1	26.710.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan RKA-SKPD (dibuat)	1	2.120.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan RKA-SKPD (dibuat)	1	2.120.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan RKA-SKPD (dibuat)	1	1.470.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kebijakan RKA-SKPD (dibuat)	1	1.470.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dibuat)	1	45.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dibuat)	1	45.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Lainnya SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD (dibuat)	1	31.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Lainnya SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD (dibuat)	1	31.500.000	
Penyusunan Laporan Tahunan UMBUT	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Laporan Tahunan UMBUT Perangkat Daerah (dibuat)	1		Penyusunan Laporan Tahunan UMBUT	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Laporan Tahunan UMBUT Perangkat Daerah (dibuat)	1		
Administrasi Manajemen Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis Utama	Pertemuan rutin antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	4.134.000.000	Administrasi Manajemen Perangkat Daerah	Kebijakan Strategis Utama	Pertemuan rutin antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat	100	4.134.000.000	
Penyusunan Kebijakan Terhadap AUP	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Orang yang Melakukan Uraian dan Laporan AUP (dibuat)	20	2.000.000.000	Penyusunan Kebijakan Terhadap AUP	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Orang yang Melakukan Uraian dan Laporan AUP (dibuat)	20	2.000.000.000	
Penyusunan perencanaan pembangunan jangka AMT	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Hasil Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD (dibuat)	1		Penyusunan perencanaan pembangunan jangka AMT	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Hasil Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD (dibuat)	1		
Pembentukan Perencanaan dan Pelaksanaan/Verifikasi Terhadap RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan/Verifikasi Terhadap RKA-SKPD (dibuat)	1	26.710.000	Pembentukan Perencanaan dan Pelaksanaan/Verifikasi Terhadap RKA-SKPD	Kebijakan Strategis Utama	Adalah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan/Verifikasi Terhadap RKA-SKPD (dibuat)	1	26.710.000	









<p>Penyediaan dan pemeliharaan alat-alat tulis kantor dan lain-lain yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak menimbulkan biaya.</p>	<p>Kabupaten Banggai Utara</p>	<p>Jumlah Penyediaan Kebutuhan dan Jasa Lainnya dan Jasa Penyediaan Dalam Rangka Daerah Kabupaten/Kota</p>			<p>Penyediaan Kebutuhan dan Jasa Lainnya dan Jasa Penyediaan Dalam Rangka Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kabupaten Banggai Utara</p>	<p>Jumlah Penyediaan Kebutuhan dan Jasa Lainnya dan Jasa Penyediaan Dalam Rangka Daerah Kabupaten/Kota</p>		
<p>Pembelian dan pemeliharaan barang-barang modal yang tidak termasuk dalam kategori tanah, bangunan, mesin, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan perlengkapan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori barang-barang modal yang tidak menimbulkan biaya.</p>	<p>Kabupaten Banggai Utara</p>	<p>Jumlah Pemasangan dan Pemeliharaan Bangunan dan Kebutuhan Lainnya</p>	18	24,000,000	<p>Pembelian dan pemeliharaan barang-barang modal yang tidak menimbulkan biaya dan lain-lain yang tidak menimbulkan biaya.</p>	<p>Kabupaten Banggai Utara</p>	<p>Jumlah Pemasangan dan Pemeliharaan Bangunan dan Kebutuhan Lainnya</p>	18	24,000,000

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana kerja pembangunan perikanan, program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pilihan perikanan telah dibahas bersama-sama oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan mempertimbangkan masukan dari hasil Musrenbangcam (musyawarah rencana pembangunan kecamatan) dan proposal yang masuk ke Dinas Perikanan, meliputi:

- a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang kecamatan yang diakomodir kedalam aplikasi SIPD yaitu:
  1. Kerambah Jaring Apung
- b. Usulan Pokdakan dan KUB nelayan melalui proposal yaitu :
  1. Penyediaan bibit ikan (unggu) untuk ikan nila, gurame dan patin
  2. Pengadaan pakan ikan gratis
  3. Pengadaan alat-alat produksi perikanan
  4. Jalan Produksi pembudidaya ikan
  5. Pengadaan sarana dan prasarana nelayan , seperti perahu dan motor roda tiga.

Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program dan kegiatan dari pihak yang berkepentingan dapat dilihat Tabel sebagai berikut ini :

*Tabel : II.11 Usulan program dan kegiatan dari para pemungku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Bengkulu Utara*

**Tabel 4.11**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PAPA PEMANGKLI KEPENTINGAN**  
**TAHUN 2021 KABUPATEN BONGOLU UTARA**

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	WISYAWA/STAKEHOLDERS	BESARAN/LODUNG	CATATAN
2		4	5	6
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil</b>				
1. Kerambah Jaring Apung	Recomanan Marga Sakti Seblat	meningkatkan produksi perikanan budidaya	10 paket	Belum ada Proposal
2. Penyediaan bibit ikan unggul untuk ikan nila, gurame dan patin	Kawasan minapolitan	meningkatkan produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
3. Pengadaan pakan ikan gratis	Kawasan minapolitan	meningkatkan produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
4. Pengadaan alat-alat produksi perikanan	Kawasan minapolitan	meningkatkan produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
5. Jalan Produksi pembudidaya ikan	Kawasan minapolitan	meningkatkan produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal
6. Pengadaan sarana dan prasarana nelayan, seperti perahu dan motor roda tiga	Kawasan minapolitan	meningkatkan produksi perikanan budidaya	1 Paket	Sudah Ada Proposal

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

##### Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wakil presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

**VISI : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

**MISI :**

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Menunculkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bernartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap bangsa dan Memberikan rasa Aman pada Seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk mendukung visi dan misi Presiden 2020-2024 agar selaras dengan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara telah mempunyai vis, misi dan moto antara lain :

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Adil dan Sejahtera Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas.**

**Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan.**

**Moto : Apapun Minumnya Makanannya Tetap Ikan.**

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61). Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dinas Perikanan Tipe B yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Rensra KKP Tahun 2020-2024), Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa **"Laut adalah Masa Depan Bangsa"** yaitu mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga misi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan ke depan, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang disusun menjabarkan 3 (tiga) pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan termasuk strategi dan langkah operasional yang dijabarkan sebagai berikut

1. Kebijakan Pokok

- a. membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan



Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah :

a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dalam rangka membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan dengan strategi :

1) Pemberantasan IUU *Fishing* dan *Destructive Fishing*

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:

- a) pencegahan terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- b) pemantauan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) operasional pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- d) operasi armada pengawasan SDKP; dan
- e) penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2) Penguatan Sistem Karantina Ikan

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah :

- a) penguatan sistem karantina ikan;
- b) sinergi pengawasan lalu lintas ikan;
- c) pelayanan tindak karantina ikan di *entry* dan *exit point* serta pos lintas batas (*gateway*) wilayah perbatasan;
- d) pengendalian agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan bersifat invasif.

b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan strategi :

- 1) pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan budidaya bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan strategi optimalisasi produksi, dan produktivitas perikanan tangkap, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, peningkatan keberdayaan nelayan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 3) pengelolaan sumber daya kelautan yang berdaya saing dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) zonasi dan tata ruang laut;
  - b) pengembangan produk dan jasa kelautan;
  - c) konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan;
  - d) mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  - e) penanganan pencemaran laut dan sampah plastik; dan
  - f) penumbuhan budaya bahari, riset, dan data kelautan.
- 4) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang sensitif terhadap kerentanan bencana dan perubahan iklim. Dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  - b) pengarusutamaan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
  - c) penyiapan program khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bidang kelautan dan perikanan dengan strategi
- 1) peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
  - 2) peningkatan usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- d. Mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan strategi :
- 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
  - 2) peningkatan inovasi teknologi dan riset bidang kelautan dan perikanan.
- e. Kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual dilakukan melalui pendekatan transformasi digital dengan strategi *one data* KKP, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis *website* dan transparansi perizinan berbasis *online system* dan penciptaan kebijakan berbasis riset dan pengetahuan faktual.
- f. optimasi reformasi birokrasi menuju birokrasi KKP berkelas dunia dilakukan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi KKP berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu :
- 1) *human capital*;
  - 2) *organization capital*;
  - 3) *financial & planning capital*;
  - 4) *information capital*;
  - 5) *control capital*.

## 2. Kebijakan pengarusutamaan

### a. Gender

Untuk melaksanakan arah kebijakan terkait gender, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang mencakup :

- 1) pencrapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 2) penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di KKP;
- 3) penyiapan *roadmap* PUG;
- 4) penyusunan data terpilah;
- 5) pengembangan statistik gender;
- 6) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja eselon I di KKP dan antar pusat daerah;
- 7) pembuatan profil gender;
- 8) monitoring dan evaluasi PUG KKP.

### b. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan KKP dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), *talent management* untuk pengembangan pola rekrutmen dan suksesi pimpinan, *assessment center* untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai secara rutin, dan *carrier plan* untuk penyiapan pola karir pegawai sesuai kompetensi dan bakat. *reward and punishment*, mengelola, mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menjadikan SDM ASN sebagai modal, *information capital* (e-KKP dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *one data* serta *corporate university*, *organization capital* (*right sizing*/penataan organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan, penataan birokrasi menuju *world class government*, *smart office* und *green*

*building*, dan kerja sama yang memberikan *mutual benefit* pusat daerah, antardacrah, dan internasional), *finansial capital* (*e-planning*, dan *e-budgeting*), dan *control capital* (penguatan sistem pengendalian *intern* dan pengawasan *intern*).

#### c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu :

- 1) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;
  - 2) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan; dan
  - 3) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

#### d. Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- 1) rehabilitasi wilayah pesisir (termasuk pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut;
- 2) pengembangan kawasan pesisir tangguh;
- 3) sistem peringatan dini kebencanaan wilayah pesisir laut;
- 4) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- 5) modal.

#### e. Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi, dan jejaring sosial, dan sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal

dasar pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil.

#### f. Transformasi Digital

Penerapan transformasi digital di lingkungan KKP dilakukan melalui Penerapan SPBE KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* serta penataan sistem perizinan berbasis web (*online*).

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran maka lebih dahulu dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan yang menjadi kunci dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan melihat *Strength*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* (SWOT). Selanjutnya analisis diarahkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya manusia perikanan yang memadai (kualitas dan kuantitas)
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan

- e. Adanya uraian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang memadai
- d. Adanya komitmen yang kuat baik pemerintah maupun masyarakat perikanan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan daerah.
- e. Adanya perangkat atau produk hukum yang jelas dan tegas baik untuk pengelola maupun terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan dan bahan pengolahan hasil perikanan yang berbahaya bagi kesehatan.

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah tersebut maka tujuan pembangunan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan penerimaan daerah dan devisa negara dari hasil perikanan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil , pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya.
- d. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan.
- e. Meningkatkan penerapan informasi teknologi serta kelembagaan.
- f. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- g. Meningkatkan kinerja yang profesional aparat Dinas Perikanan.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan di Bengkulu

Utara, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dalam periode 2022 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja pembinaan akuntabilitas kinerja
- b. Meningkatnya pertumbuhan produksi pada sektor perikanan

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 dan Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk menunjang kelancaran proses administrasi kantor dan mendukung akuntabilitas kinerja. Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah ketersediaan alat tulis kantor dan sarana penunjang administrasi kantor, ketersediaan sarana kebersihan, komunikasi, listrik dan sumber daya air serta ketersediaan biaya operasional kantor selama 1 tahun anggaran, selain itu juga dalam upaya meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKPD.

Sedangkan untuk indikator kinerjanya adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif, efisien, lancar dan tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
  - **Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
- c. **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**
- d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
  - **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
  - **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
  - **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
- e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
- f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
  - **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

## **3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui peningkatan sarana dan prasarana kelompok pembudidaya ikan serta pembinaan sosialisasi mengenai pengembangan budidaya ikan yang baik. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat

#### 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pengolahan ikan guna meningkatkan nilai tambah/jual produksi perikanan untuk mendukung perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Adapun indikator kinerjanya adalah persentase peningkatan produksi pengolahan ikan pertahun.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program diatas antara lain :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
  - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel : III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bengkulu Utara.*

Tabel III.1  
RUMAH RUMAH PROGRAM DAN KEGIATAN PANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERIKHMAN MAJU 2024  
Kabupaten Bengkulu Utara

RUMAH RUMAH PROGRAM DAN KEGIATAN PANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian/Detail Uraian Penyelenggaraan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Periklanan Maju Rencana Tahun 2024		
			Luas	Target Output Kinerja	Ketersediaan Dana / Page Indikatif	Budget Dasar		Target Capaian Kinerja	Ketersediaan Dana / Page Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN					3.545.080,011				3.545.080,011
3 20	URUSAN PEMERINTAHAN MELALUI DESA/KAWASAN DAN PERKOTAAN					3.545.080,011				3.545.080,011
3 20 01	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan urusan/kegiatan pemerintahan pemerintah Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100		3.545.153,507			100	4.880.801,445
3 20 01 2.01	Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100		98.992,099			100	28.743,818
3 20 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	1		28.733,115	APBD		1	25.428,375
3 20 01 2.01 02	Keterampilan dan Penguasaan (Analisis RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2		3.139,719	APBD		2	3.139,719
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	1						
3 20 01 2 01 04	Keterampilan dan Penguasaan Dokumen LRA-SKPD	Jumlah Dokumen LRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen LRA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2		3.676,291	APBD		2	1.676,291
3 20 01 2 01 05	Keterampilan dan Penguasaan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	2		925,900	APBD		2	925,900

3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja dan Kinerja Tambahan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Kinerja dan Kinerja Tambahan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja dan Kinerja Tambahan Kinerja SKPD-Laporan	Kabupaten Bengkulu Utara	4	24.507,030	APRD		3	24.507,030
3	25	01	2.01	07	Desain Kerja Perangkat Lunak	Jumlah Laporan Desain Kerja Perangkat Lunak (Laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara			APRD		2	10.000,000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembelian persediaan administratif termasuk Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	3.139.775,948	APBD		100	3.139.775,948
3	25	01	2.02	08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang, bulan)	Kabupaten Bengkulu Utara	29	3.083.521,354	APBD		30	3.716.384,313
3	25	01	2.02	07	Pembelian perlengkapan, peralatan dan Peralatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		2	5.638,142
3	26	01	2.02	03	Pembelian Pralatihan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pralatihan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Kabupaten Bengkulu Utara	1	50.214,003	APBD		12	60.619,961
3	25	01	2.03	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan tahunan/ tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		3	2.500,000
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pembelian persediaan administratif SKPD Perangkat Daerah (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	100	43.400,000	APBD		100	43.400,000
3	25	01	2.03	06	Penyediaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	43.400,000	APBD		2	43.400,000
3	26	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembelian persediaan kepegawaian Perangkat Daerah (persentase)	Kabupaten Bengkulu Utara	100		APBD		100	68.000,000
3	25	01	2.05	02	Penyediaan pakaian dinas berupa atribut keorganisasian	Jumlah Paket Pakaian Dinas berupa atribut keorganisasian (paket)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		10	40.000,000
3	25	01	2.06	09	Penelitian dan pelaksanaan program penelitian, kajian, studi dan tugas	Jumlah Program, Penelitian, Tugas dan Kajian yang Menghasilkan Produk dan Peningkatan (PRLG)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		1	25.000,000

3	20	01	2.06	Aktifitas Dinas Kesehatan Dierah	Persentase pemeliharaan Akutabstrak rumah (%)	Kabupaten Bangkulu Utara	00	100.000.700	APBD		30	104.400.347	
3	25	01	2.06	02	Persediaan persalinan dan persungupan kebidan	Jumlah Paliu Persalinan dan Persungupan Kebidan yang Disediakan (paliu)	Kabupaten Bangkulu Utara			APBD		5	10.000.000
3	26	01	2.06	04	Persediaan Rakas Logistik Kantor	Jumlah Rakas Bekas Logistik Kantor yang Disediakan (paliu)	Kabupaten Bangkulu Utara	23	37.800.101	APBD		23	70.544.740
3	29	03	2.06	05	Akreditasi Bidang Gamelan dan Pengabdian	Jumlah Paliu Bidang Gamelan dan Pengabdian yang Disediakan (paliu)	Kabupaten Bangkulu Utara	32	5.102.001	APBD		5	6.100.001
3	26	01	2.06	06	Persediaan Rakas Beasun dan Perumahan Penyandang-Undangan	Jumlah Dikawatir Selain Beasun dan Perumahan Penyandang-Undangan yang Disediakan (dikawatir)	Kabupaten Bangkulu Utara	2	7.010.000	APBD		2	7.010.000
3	25	03	2.06	06	Pengembangan Kapas Koordinasi dan Logistik KCPD	Jumlah Laporan Pengembangan Kapas Koordinasi dan Logistik KCPD (laporan)	Kabupaten Bangkulu Utara	50	50.000.000	APBD		35	50.000.000
3	28	01	2.07		Proyeksi Biaya BMD Dierah Perbaikan Dierah Perbaikan Dierah	Jumlah proyeksi BMD (unit)	Kabupaten Bangkulu Utara	11		APBD		11	00.000.000
3	26	01	2.07	02	Persediaan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bangkulu Utara			APBD		1	20.000.000
3	25	01	2.07	05	Persediaan Mebel	Jumlah Paliu Mebel yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bangkulu Utara			APBD		5	3.000.000
3	25	01	2.07	06	Persediaan Perbaikan dan Nerasi Lemari	Jumlah Unit Perbaikan dan Nerasi Lemari yang Disediakan (unit)	Kabupaten Bangkulu Utara			APBD		5	10.000.000
3	28	01	2.08		Persediaan Jasa Perbaikan Dierah Perbaikan Dierah	Persentase pemeliharaan jasa Perbaikan (%)	Kabupaten Bangkulu Utara	100	100.000.700	APBD		100	104.000.347
3	25	01	2.09	02	Persediaan Jasa Evakuasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Evakuasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Bangkulu Utara	12	36.447.707	APBD		12	36.447.707
3	25	01	2.08	04	Persediaan Jasa Pelayanan Urgensi Kantor	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Pelayanan Urgensi Kantor yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Bangkulu Utara	12	117.000.000	APBD		12	147.000.000
3	28	01	2.09		Persediaan Biaya BMD Dierah Perbaikan Dierah Perbaikan Dierah	Persentase pemeliharaan Perbaikan BMD (%)	Kabupaten Bangkulu Utara	100	00.000.000	APBD		100	004.000.000
3	26	01	2.09	03	Persediaan Jasa Perbaikan, Raks Perbaikan, Pelek dan Perbaikan Kendaraan Perumahan Dierah atau kendaraan dinas lainnya	Jumlah Kendaraan Perumahan Dierah atau Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas lainnya yang Disediakan dan dibayarkan (kendaraan)	Kabupaten Bangkulu Utara	1	35.000.000	APBD		2	35.000.000

3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Tuntutan Kendaraan Dalam Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dipelihara (Jenis dan Perawatannya (Rak))	Kabupaten Bengkulu Utara	16	15.000.000	APBD		21	34.997.000
3	25	01	2.09	05	Pembelian Perbaikan dan Mesin Lain-lain	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lain-lain yang Diperbaiki (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara	10	1.500.000	APBD		17	5.000.000
3	25	01	2.09	09	Pembelian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		6	140.000.000
3	25	02			Program Pengabdian Masyarakat Tanggap	Persentase pelaksanaan program pengabdian masyarakat (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	3,7	91.000.000	APBD		3,7	388.881.464
3	26	06	2.03		Pengabdian Masyarakat Desa di Wilayah Bengkulu, Bangka, Belitung, Karas, dan Kecamatan di Lainnya yang dapat dipisahkan dalam Laporan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait pengabdian masyarakat Desa di wilayah provinsi maupun Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkulu Utara	10	4.000.000	APBD		10	325.000.000
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Jasa dan Infoteks Sumber Daya Man	Jumlah Jasa dan Infoteks Sumber Daya Man dan Perawatan Man di dalam Satu Kabupaten/Kota yang Terjadi (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		1	30.000.000
3	25	03	2.01	04	Penyediaan Jasa/layanan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Jasa/layanan Usaha Perikanan Tangkap yang Terjadi (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	6.000.000	APBD		2	95.050.000
3	25	03	2.03	01	Pelaksanaan Kewajiban Survei Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Survei Usaha Perikanan Tangkap yang Terjadi dan Terjadi (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		5	30.000.000
3	25	03	2.03		Pembelian Jasa Pelayanan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan layanan yang kecil (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	94,12	18.000.000	APBD		94,12	126.140.808
3	25	03	2.04	01	Pengembangan Kapasitas Pelayanan Kecil	Jumlah Pelayanan Kecil yang dikembangkan kapasitasnya (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara	250	15.000.000	APBD		250	50.000.000
3	25	03	2.04	02	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kewilayahan pelayanan kecil	Jumlah Kelompok Pelayanan Kecil yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan oleh Pengembang Wilayah (Rak)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		54	44.100.000
3	25	04	2.02		Pengabdian dan pengabdian masyarakat melalui Pelayanan Desa (PP)	Persentase layanan masyarakat melalui pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Desa (%)	Kabupaten Bengkulu Utara	85		APBD		80	37.431.480
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui Pelayanan Desa (PP)	Jumlah Layanan dalam rangka pengabdian masyarakat melalui Pelayanan Desa (PP) (layanan)	Kabupaten Bengkulu Utara			APBD		7	37.511.850

3	28	04		Program Pengabdian Masyarakat	Persentase Penyalangan Pribadi Perikanan (%)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	1,2	60,918,144	APBU	1,4	627,000,000	
3	28	04	2.02	Pembelajaran Pengabdian Masyarakat	Jumlah kelompok pembudidaya Bak (POKORAKA) yang dibudidayakan (kabupaten)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	18		APBD	18	180,000,000	
3	25	04	2.07	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya Bak	Jumlah kelompok Peran di Desa dan Kadi yang menerima Peningkatan Kapasitas (kelompok)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)		APBD	25	70,000,000	
3	25	04	2.07	04	Penelitian, pengembangan, dan/atau akademi atau penelitian lainnya dan informasi serta penyediaan penelitian dan penelitian	Jumlah Kelompok Usaha yang Menerima Penelitian, Konsultasi Akademi dan Pengembangan, Teknik dan biologi, Serta Penyediaan Penelitian dan Penelitian (kelompok)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)		APBD	25	80,000,000	
3	28	04	2.08		Pengabdian Masyarakat	Jumlah Kelompok Pembudidaya Bak yang aktif (kabupaten)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	148	60,018,144	APBD	161	387,000,000
3	25	04	2.09	02	Pengembangan Perikanan Pembudidayaan Bak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perikanan Pembudidayaan Bak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (kota)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	8	8,000,000	APBD	8	185,000,000
3	25	04	2.04	03	Pengabdian Masyarakat sebagai pembudidayaan Bak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Belanja Pembudidayaan Bak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (kota)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)		APBD	8	101,000,000	
3	25	04	2.04	04	Pengabdian Masyarakat dan dan Layanan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil dan dan Layanan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Pergi Melalui Pengabdian Masyarakat dan (kota)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	1	39,918,144	APBD	1	70,000,000
3	25	04	2.04	06	Promosi, pengembangan perikanan dan perikanan lain untuk pembudidayaan dan di desa	Luar Laba untuk Pembudidayaan dan di Desa yang di-rumahnya, diperolehnya. Lahan/luas dan Luas (m <sup>2</sup> )	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	150	15,000,000	APBU	1	41,000,000
3	28	04		Program Pengabdian dan Pemasyarakatan Kadri Perikanan	Persentase Penyalangan Pribadi Bidang Perikanan (%)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	3,8	16,080,000	APBD	3	128,000,000	
3	28	04	2.01	Pembelian Tanah Kadri Perikanan Pengabdian Kadri Perikanan bagi Desa Bak dan Kadri	Jumlah lahan/luas yang dibudidayakan untuk bidang Bak dan Kadri Perikanan (lahan/luas)	Kabupaten Bangkulu (Ibun)	8		APBD	8	8,000,000	



3	26	06	2.01	03	Perubahan Data dan Informasi Usaha Perumahan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data yang termasuk Usaha Perumahan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (0000000)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD			1	5.000.000
3	28	06	2.02		Penelitian mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk inspeksi dan pengujian kualitas produk unggulan	Kabupaten Bengkulu Utara	6		-	APBD			8	40.000.000
3	25	06	2.02	01	Kejelasan Matriks dan persyaratan persyaratan (PM) standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Uji Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pengujian Terhadap Persyaratan Penyelenggaraan Per usaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (sari 00000)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD			9	60.000.000
3	29	06	2.03		Penyusunan dan Penyelenggaraan Buku Saku tentang Pengolahan dan Distribusi (garam) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan pengalihan buku saku dan materi lain dan lain yang terdapat (5)	Kabupaten Bengkulu Utara	2	15.000.000	-	APBD			8	60.000.000
3	25	06	2.03	01	Pengalihan kewenangan dan wewenang kewenangan dan Usaha Pengolahan dan Distribusi Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengalihan Kewenangan dan Usaha Pengolahan dan Distribusi Daerah Kabupaten/ Kota (sari 00000)	Kabupaten Bengkulu Utara			-	APBD		33,34	30.000.000	
3	25	06	2.03	02	Penelitian (uji) bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil di dalam (sari) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terdaftar (pelaku usaha)	Kabupaten Bengkulu Utara	15	15.000.000	-	APBD			17	30.000.000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat terbatasnya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Prioritas daerah.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi perikanan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan bidang perikanan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan perikanan tahap berikutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan mempertimbangkan prioritas daerah dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut.

TABEL IV.1  
KENDARA KERJA DAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH

Rincian APBD - Masa Perencanaan Kabupaten Bengkulu Utara

Kode Rekening	Uraian/Isiung Sub-Program/Program/Kelembagaan/Instansi	Pencapaian Daerah	Rincian Sub-kegiatan/Kelembagaan	Uraian	Indikator Kinerja				Page Indikasi (Rp)	Pembelian Mula (Rp)	Jumlah Peng. & Peng. (Rp)	Perkiraan Jumlah Pengeluaran Akhir
					Program/Kelembagaan		Kelembagaan, Sub-Kelembagaan/Instansi					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0									2.242.299.418	4.942.482.589		
0 04									2.242.299.418	4.942.482.589		
0 04 04	Program Peningkatan Kualitas Pemasokan Daerah Kabupaten (PMK)	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			2.242.299.418	4.942.482.589		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			99.999.999	78.743.978		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01	Pengalokasian Anggaran, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			28.750.719	28.750.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan
0 04 04 1.01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Kelembagaan dan Pemasokan Daerah	Kelembagaan/Kelembagaan Tesis Kritis Pemasokan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemasokan	Kelembagaan Program Daerah	Perencanaan pelaksanaan peningkatan pelayanan Pemasokan Daerah (PL)	100			1.200.719	1.200.719		Statis Pemasokan



2	08	01	2.08	Program dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			200	162,000,000	162,000,000		Program Pendidikan
3	15	01	3.08	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			10	30,000,000	30,000,000		Program Pendidikan
4	15	01	3.08	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			10	117,000,000	117,000,000		Program Pendidikan
5	24	01	2.49	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			100	44,000,000	44,000,000		Program Pendidikan
6	33	31	3.30	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			1	30,000,000	30,000,000		Program Pendidikan
7	33	31	3.30	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			5	12,000,000	12,000,000		Program Pendidikan
8	33	01	3.30	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			10	2,000,000	2,000,000		Program Pendidikan
9	33	01	3.30	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan					100,000,000		Program Pendidikan
4	00	00		Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan		1,3		21,000,000	21,000,000		Program Pendidikan
5	00	00	4.01	Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			10	4,000,000	4,000,000		Program Pendidikan
6	00	00	5.01	Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan					20,000,000		Program Pendidikan
7	00	00	5.01	Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			2	4,000,000	4,000,000		Program Pendidikan
8	00	00	5.01	Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan					80,000,000		Program Pendidikan
9	00	00	5.01	Program Pengembangan Pendidikan	Program Pengembangan Pendidikan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			PL13	18,000,000	18,000,000		Program Pendidikan
1	33	31	3.30	Keperawatan JIKA (KEMERDEKAAN) dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Dasar	Subsidi Bantuan Tesis Kalkulasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan	Meningkatkan kemampuan kerja	Kategori Kegiatan			100	12,000,000	12,000,000		Program Pendidikan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang kemudian berubah menjadi Rencana Kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah tahun 2023.

Fokus perhatian pembangunan bidang perikanan tahun 2023 meliputi, peningkatan sarana prasarana kelompok pembudidaya ikan dan nelayan kecil, pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk olahan perikanan, serta pengembangan kawasan minapolitan. Adapun kaidah – kaidah pelaksanaannya akan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan sumber anggaran pendanaan (APBD, APBD- Prov, Hibah APBN, DAK).

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai pedoman bagi aparat Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan.